



**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA BARANG WILAYAH (UAPPB-W)  
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA BARAT  
LAPORAN BARANG PEMBANTU PENGGUNA BARANG WILAYAH  
TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**I. PENDAHULUAN**

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 532/KM.6/2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Departemen Keuangan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.6/2013 tentang modul Penyusutan BMN berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;



15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.01/2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Selaku Pengguna Barang Kepada Pejabat Struktural dan Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Keuangan Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Keuangan;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

**B. Entitas Pelaporan CaLBMN ini adalah Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat.**

**C. Periode Laporan CaLBMN ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.**

## **II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA**

Dalam laporan BMN ini menerangkan hasil Penataan BMN melalui Aplikasi SAKTI yang telah mengakomodir kebijakan tentang penggolongan dan kodefikasi barang sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 532/KM.6/2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara, dan juga telah mengakomodir tentang Kapitalisasi, Rekonsiliasi maupun Penyusutan BMN.

## **III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN**

Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah TAHUNAN Tahun Anggaran 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek yang ditatausahakan dan dikelola oleh Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) pada Satuan Kerja (UAPPB-W) di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat.

Nilai BMN Gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada akhir TAHUNAN Tahun Anggaran 2023 ini adalah Rp216.744.633.050 (dua ratus enam belas miliar tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp215.446.950.708 (dua ratus lima belas miliar empat ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah) dan nilai mutasi yang terjadi selama TAHUNAN Tahun Anggaran 2023 yaitu bertambah sebesar Rp2.829.236.040 (dua miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat puluh rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp1.531.553.698 (satu miliar lima ratus tiga



puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari APBN dan Transfer Masuk selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periodetahun berjalan termasuk di dalamnya transfer keluar, penghapusan, penghentian penggunaan, dan reklasifikasi BMN.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan ini terdiri atas :

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang;
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Internal UAPPB-W dengan UAPPA-W Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat;
14. Arsip Data Komputer (ADK).

#### **IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PER 31 Desember 2023**

1. Saldo Awal TAHUNAN Tahun Anggaran 2023

Nilai BMN per 1 Januari 2023 menurut UPPB-W Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat adalah sebesar Rp215.446.950.708 (dua ratus lima belas miliar empat ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah), yang terdiri dari nilai BMN



intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan di Neraca) sebesar Rp215.334.938.688 (dua ratus lima belas miliar tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) dan BMN ekstrakomptabel sebesar Rp112.012.020 (serratus dua belas juta dua belas ribu dua puluh rupiah).

Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara TAHUNAN Tahun Anggaran 2023

Mutasi BMN per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

1) Persediaan

Saldo Persediaan pada UAPPB-W Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat per 31 Desember 2023 sebesar Rp319.074.734 (tiga ratus sembilan belas juta tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp218.017.320 (dua ratus delapan belas juta tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah), total mutasi persediaan selama periode laporan berkurang Rp101.057.414 (serratus satu juta lima puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah). Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Kode	Uraian	Per 1 Januari 2023	Mutasi	Nilai s/d 31 Desember 2023
117111	Barang Konsumsi	218.017.320	101.057.414	319.074.734

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang adalah sebesar Rp0,00, yang terdiri dari barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp0,00 dan kondisi usang senilai Rp0,00.

2) Tanah

Saldo Tanah pada UAPPB-W Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat per 31 Desember 2023 sebesar 22.899 m<sup>2</sup>/ Rp142.178.618.000 (seratus empat puluh dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah). Dari jumlah/nilai tanah di atas, tidak ada jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

3) Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada UAPPB-W Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat per 31 Desember 2023 sebanyak 5.519 (lima ribu lima ratus sembilan belas) unit dengan nilai sebesar Rp35.670.585.026 (tiga puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua puluh enam rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 5.349 (lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan) unit dengan nilai sebesar Rp34.441.398.143



(tiga puluh empat miliar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah), dengan mutasi tambah sebesar Rp1.917.323.123 (satu miliar sembilan ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp688.136.240 (enam ratus delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah).

4) Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 61 (enam puluh satu) unit dengan nilai sebesar Rp37.576.793.704 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 61 (enam puluh satu) unit dengan nilai sebesar Rp37.347.040.787 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta empat puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), dengan mutasi tambah sebesar Rp229.752.917 (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp0 (nol rupiah).

5) Jaringan

Saldo Jaringan pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), dengan mutasi tambah Rp0 (nol rupiah) dan mutasi kurang Rp0 (nol rupiah).

6) Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 588 (lima ratus delapan puluh delapan) unit dengan nilai sebesar Rp109.063.960 (seratus Sembilan juta enam puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 588 (lima ratus delapan puluh delapan) unit dengan nilai sebesar Rp109.063.960 (seratus Sembilan juta enam puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), dengan mutasi tambah dan mutasi kurang sebesar Rp0 (nol rupiah).

7) Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan

Saldo Aset Tetap Yang Tidak Digunakan pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) unit dengan nilai sebesar Rp1.209.572.360 (satu miliar dua ratus sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) unit dengan nilai sebesar Rp1.370.829.818 (satu miliar tiga ratus tujuh



puluh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah), dengan mutasi tambah sebesar Rp682.160.000 (enam ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp843.417.458 (delapan ratus empat puluh tiga juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).

## **INFORMASI BMN LAINNYA**

### **1. Perkembangan Nilai BMN**

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 6 (enam) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

No.	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	2018	224.439.283.420	2.110.563.423	0,95%
2	2019	205.135.858.284	-19.303.425.136	-8,60%
3	2020	207.415.068.061	2.279.209.777	1,11%
4	2021	216.154.165.138	8.739.097.077	4,21%
5	2022	215.446.950.708	(-707.214.430)	-0,33%
6	2023	216.744.633.050	1.297.682.342	0,60%



## 2. Informasi Pengelolaan BMN

### a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Sudah Ditetapkan Status (Rp)	Belum Ditetapkan Status (Rp)
1	Tanah	142.178.618.000	-
2	Peralatan dan Mesin	34.346.132.123	-
3	Gedung & Bangunan	37.331.444.787	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	-
5	Aset tetap lainnya	107.913.960	-
6	Aset Lain-Lain	1.370.829.818	-
Jumlah		215.334.938.688	-

### b. Pengelolaan BMN

No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindahan	Penghapusan	Jumlah
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang *)	-	-	-	-	-
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang	-	-	-	-	-
3	Dalam proses Pengelola Barang	-	-	-	-	-
4	Selesai di Pengelola Barang	-	-	-	-	-
	a.Dikembalikan	-	-	-	-	-
	b.Ditolak	-	-	-	-	-
	c.Disetujui	-	-	3	-	-
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang	-	-	-	-	-
6	Telah diterbitkan Keputusan dari Pengelola Barang atau Pengguna Barang	3	-	-	-	-
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	-	-	-	-	-
8	Selesai serah terima	-	-	-	-	-

### c. Pengelolaan BMN Idle

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN <i>Idle</i>	-
2	Ditetapkan sebagai BMN <i>Idle</i> oleh Pengelola	-



3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN <i>Idle</i> oleh Pengelola	-
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	-
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	-

**3. Informasi Terkait BMN yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang**  
**d. Daftar Barang Hilang yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang.**

Nilai BMN hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0.00. Daftar Barang Hilang yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut :

No	Perkiraan Neraca	Nilai Perolehan	Nilai Buku
1	Tanah	-	-
2	Peralatan dan Mesin	-	-
3	Gedung & Bangunan	-	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
5	Aset tetap lainnya	-	-
Total			

**e. Daftar Barang Dengan Kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang.**

Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang direncanakan diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 (nol rupiah).



## **V. INFORMASI TAMBAHAN**

### **1. BADAN LAYANAN UMUM**

Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat tidak memiliki Badan Layanan Umum.

### **2. INFORMASI LAINNYA**

Tidak terdapat BMN yang diperoleh dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

### **3. REKONSILIASI**

Terhitung sejak TAHUNAN tahun 2018 tidak dilakukan rekonsiliasi dengan Kanwil DJKN Jawa Barat selaku Pengelola Barang tingkat wilayah.

Disamping itu terlampir Laporan Barang Pembantu Pengguna Barang Wilayah Tahunan Tahun Anggaran 2023 yang berasal dari proses penginputan data BMN dan barang persediaan melalui Aplikasi SAKTI.

UAPPB – Wilayah

Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat.



Ditandatangani secara elektronik  
Tavianto Noegroho

